



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 837/X/2014

III/OKTOBER 2014



## Terima Kasih Presiden SBY

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

# Pimpinan MPR, DPR dan DPD Silaturahmi dengan Presiden SBY

Pimpinan MPR, DPR dan DPD yang baru saja terpilih berinisiatif mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara itu berlangsung hangat, membicarakan sejumlah isu terkini termasuk agenda pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

“Saya bersama Pimpinan MPR dan DPD menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden DR Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berhasil selama 10 tahun pemerintahannya. Ini terbukti APBN 2004 yang hanya Rp397,4 triliun sekarang sudah mencapai Rp2037 triliun,” kata Ketua DPR Setya Novanto kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (16/10/14).

Ketua DPR yang didampingi empat wakil ketua juga menyampaikan harapan, presiden dapat membagikan pengalaman beliau sebagai pemimpin untuk perjalanan Bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Salah satu yang paling mengemuka menurutnya adalah membangun dan mempraktekkan demokrasi.

Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam kesempatan itu secara resmi menyampaikan undangan kepada Presiden SBY untuk mengikuti Upacara Pelantikan Presiden Terpilih (20/10). Kehadiran banyak tokoh dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat menurunkan tensi politik.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah presiden dan wakil presiden sebelumnya dan yang terpilih hadir dalam satu upacara. Ini merupakan tonggak sejarah bagi kemajuan demokrasi di tanah air. Kita melakukan sejumlah upaya untuk menurunkan tensi politik yang awalnya luar biasa, ada isu penjajalan, boikot bahkan sampai dekrit,” tuturnya.



Pimpinan MPR, DPR, dan DPD saat memberikan keterangan Pers

la secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Presiden SBY yang berkenan datang lebih awal dalam acara tersebut untuk menyambut kehadiran sembilan Kepala Pemerintahan diantaranya PM Australia, Malaysia, Singapura dan Presiden Iran.

Sementara itu Presiden SBY mengatakan silaturahmi yang dimulai pukul 19.40 WIB tersebut sangat bermakna meskipun berlangsung diakhir masa jabatannya. “Pertemuan malam ini bermakna meskipun masa tugas tinggal satu hari atau satu jam sekalipun, semoga selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif Pimpinan MPR, DPR dan DPD untuk berkenan melakukan pertemuan dengan saya,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut Presiden SBY didampingi oleh Wakil Presiden Budiono, sejumlah menteri diantaranya Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Jaksa Agung Basrief Arief dan Kapolri Jendral Polisi Sutarmam. (iky)/foto:andri/parle/iw.

# Paripurna DPR Resmi Tetapkan 11 Komisi

Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (16/10) resmi menetapkan jumlah 11 Komisi, berarti tidak ada perubahan sebagaimana DPR sebelumnya. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto diputuskan bahwa jumlah anggota DPR RI dalam Komisi-komisi berjumlah antara 46 hingga 56 anggota.

“Berdasarkan rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi telah ditetapkan akan jumlah Komisi yang tidak berbeda dari DPR periode sebelumnya, yakni 11 Komisi. Karena kami melihat 11 komisi sudah cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara untuk bidang dan mitra kerja masing-masing Komisi akan ditentukan dalam Rapat paripurna mendatang, menunggu terbentuknya Kabinet mendatang,” ungkap Ketua DPR, Setya Novanto.

Pada kesempatan itu wakil ketua DPR, Fadli Zon juga membacakan komposisi anggota dalam alat kelengkapan. Dimana jumlah anggota dalam Komisi disesuaikan berdasarkan perolehan suara partai dalam pemilihan umum beberapa waktu yang lalu.



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna

“Sedangkan alat kelengkapan DPR yang lain seperti BURT berjumlah 25 orang, BSAP berjumlah 50 orang anggota dan Badan Musyawarah sebanyak 56 anggota, Badan Legislasi berjumlah 74 orang anggota, sementara Majelis Kehormatan yang dulunya bernama Badan Kehormatan berjumlah 17 orang anggota,” papar Fadli Zon. (Ayu) foto: [iwana armanias/parole/iw](#)

## Ketua DPR : Pengusaha Ikut Menjaga Kedaulatan Bangsa

Negara sangat membutuhkan peran aktif pengusaha untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam era pasar bebas ini peran pengusaha juga bisa dikatakan seperti pejuang yang menjaga kedaulatan bangsanya, menjaga pasar domestiknya dari serbuan produk asing.

“Pengusaha adalah pejuang bangsa, kalau dulu pejuang kita melawan penjajah dengan bambu runcing. Sekarang pengusaha Indonesia bertugas menjaga kedaulatan bangsa, menjaga pasar domestik Indonesia dari serbuan produk asing,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto dalam sambutannya pada acara Makan Malam dengan Kadin dan Asosiasi Industri Nasional/Asing di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/14)

Acara silaturahmi ini merupakan perkenalan Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi dan anggota dewan periode 2014-2019 dengan para pengusaha Indonesia sebagai salah satu forum komunikasi anak bangsa. Ia juga menyampaikan rapat paripurna telah menetapkan jumlah dan komposisi Alat Kelengkapan Dewan sehingga siap untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kewenangan yang dimiliki, DPR bertekad agar kebijakan yang akan dilahirkan dapat bermanfaat dan mendukung upaya pembangunan yang dicita-citakan.



Ketua DPR RI Setya Novanto

Ketua DPR menekankan saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara berkembang yang diperhitungkan oleh dunia. Dinamika politik yang terjadi baru-baru ini harus menjadikan bangsa ini semakin matang dalam berdemokrasi. Ia meyakini dengan kematangan politik, negara ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan konstruktif yang tidak

saja terkait dengan bidang politik tetapi juga bidang ekonomi yang dapat memajukan bangsa sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Salah satu modal penting untuk meraih capaian lebih baik dalam periode lima tahun ke depan adalah prestasi sebagai salah satu negara di dunia dengan pertumbuhan ekonominya cukup tinggi bahkan Bank Dunia dan *International Comparison Program* (ICP) memproyeksikan Indonesia akan masuk 10 besar negara terkaya dilihat dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Selain keunggulan itu pada kenyataannya Indonesia masih dihadapkan pada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, antara lain: pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, meminimalisir biaya logistik melalui pembangunan infrastruktur perhubungan dan energi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tantangan paling penting yang sudah berada di depan mata adalah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jika MEA diberlakukan pada akhir 2015 pasar di antara negara anggota ASEAN akan terbuka. “Dengan kata lain akan terjadi perdagangan barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil secara bebas, ini harus disikapi sebagai tantangan dan peluang bagi Indonesia,” tutur politisi FPG ini.

Untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi ke depan termasuk pemberlakuan MEA, DPR periode 2009-2014 bersama pemerintah telah berhasil mengesahkan UU no.3/2014 tentang Perindustrian, UU no.7/2014 tentang Perdagangan dan UU no.20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Produk legislasi ini sebagai upaya meningkatkan daya saing produk industri dan barang serta jasa yang diperdagangkan sekaligus memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri. (iky) foto:ry/parle/iw

## Penerapan Sistem Transaksi Non Cash Positif



Anggota DPR RI, Airlangga Hartarto

Anggota DPR RI, Airlangga Hartarto menilai positif wacana penerapan sistem transaksi non tunai pada pasar tradisional. Hal itu disampaikannya

sesaat sebelum berlangsungnya Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (16/10).

“Saya setuju dengan rencana dan wacana pasar tradisional yang akan menyediakan alat pembayaran non cash karena itu akan memudahkan orang berbelanja,” ungkap Airlangga.

Selain itu ditambahkannya, sebagian besar masyarakat Indonesia juga sudah memiliki ATM (automatic teller machine), sehingga non cash yang dimaksud disini tidak hanya credit card, melainkan debit card. Sehingga kartu debit juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran di pasar tradisional yang menyediakan EDC (*Electronic Data Capture*).

Meski demikian Airlangga menyadari bahwa ada sebagian masyarakat yang

belum memiliki kartu debit apalagi kartu kredit, karena itu ia berpendapat kedua alat tersebut harus terus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri.

“Sebelum program dilaksanakan, infrastruktur pendukung memang harus disiapkan atau disediakan terlebih dahulu,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Ketika ditanya, apakah kartu tersebut harus berasal dari bank yang telah ditunjuk pemerintah? Airlangga menilai akan lebih baik jika kartu pembayaran tersebut berasal dari bank Negara atau bank Pemerintah. Karena akan mendukung kemajuan bank Negara. Namun tidak tertutup kemungkinan jika bank swasta juga ingin berperan di dalamnya, tentu dengan aturan tersendiri.

(Ayu) foto: odjie/parle/iw

## Dua Kubu Munculkan Check and Balances

Dalam sebuah proses politik munculnya dua kubu di parlemen dimana satu pihak mendukung pemerintah (eksekutif) dan kelompok lain mendukung lembaga legislatif, sebagai hal yang wajar. Di Indonesia ini masalah yang

baru, tetapi di negara lain AS dan negara-negara Amerika Latin telah melaksanakan ini. “Hal seperti ini terjadi di Amerika dan beberapa negara Amerika Latin, kemudian tumbuh ke dewasaan berpolitik, akhirnya terjadi check and



Anggota DPR Fadel Muhammad



balances yang bagus,” demikian ditegaskan anggota DPR Fadel Muhammad sebelum mengikuti Sidang Paripurna DPR, Kamis (16/10).

Politisi Partai Golkar ini mengakui, munculnya dua kubu ini sebagai hal agak baru dan sedikit canggung untuk melaksanakannya. Tetapi berdasar teori ilmu pemerintahan, hal seperti ini terjadi. Konsekuensi logisnya adalah

seluruh pimpinan AKD diambil oleh Koalisi Merah Putih dan di Pemerintahan didominasi Kelompok Indonesia Hebat terdiri PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem dan PKB.

Dampaknya bagi Indonesia ke depan, memang ini hal baru dan belum pernah terjadi seperti ini. Ke depan wajah Indonesia akan lain, karena ada sebuah tim KMP yang kompak dalam pembangun-

an parlemen ke depan. “Tentunya ini menarik sekali,” ia menambahkan.

Ini konsekuensi logis dari percaturan politik akhirnya menjadi dua kubu. “Insya Allah lima tahun ke depan mungkin KMP di eksekutif dan KIH kembali di lembaga legislatif. Kita lihat apa yang akan terbangun lima tahun ke depan,” katanya. (mp) foto: iwan armanias/parle

## DPR Dukung Program Pemerintahan Jokowi

DPR RI mendukung program kerja Pemerintahan Joko Widodo-JK yang pro rakyat.

“Kami anggota DPR RI siap mendukung program kerja Pak Jokowi, karena keberhasilan program itu untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (16/10).

Agus Hermanto mengharapkan, program kerja pada pemerintahan SBY, yang telah dilaksanakan selama ini, tetap dipertahankan dan dilaksanakan oleh Presiden Terpilih Jokowi.

“Kami yakin program kerja pro rakyat akan dipertahankan dan ditingkatkan oleh Pak Jokowi dan DPR RI akan bahu membahu bersama pemerintah demi kepentingan rakyat,” tandas politisi dari Partai Demokrat ini.

Sementara anggota DPR dari Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, terdapat sejumlah program unggulan SBY yang layak dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi di antaranya adalah penyaluran beras miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (si) foto: iwan armanias/parle



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

## Kedepankan Sikap Kenegarawanan Dalam Penetapan Pimpinan AKD

Anggota DPR diimbau untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menyikapi penetapan mekanisme pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Kita harus mengedepankan atau menonjolkan sikap kenegarawanan

dalam memutuskan pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan ini. Kita tidak perlu bersikap seperti saat pemilihan pimpinan Dewan kemarin. Jadi yang utama kedepankan asas kebersamaan serta musyawarah muafakat walaupun tidak keluar dengan sistem paket,” tambah anggota DPR



Anggota DPR Saleh Husin

Salah Husin dari Partai Hanura kepada Parleментарia, di Gedung Nusantara II, Kamis, (16/10).

Dia menjelaskan, Rapat Paripurna kali ini merupakan hasil Rapat Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi yang memutuskan bahwa jumlah Komisi dan Alat kelengkapan tetap sama. “Penyempurnaan itu yang akan dibawa kepada Rapat Paripurna,” je-

lasnya kepada Parleментарia.

Dia mengharapkan, Rapat Paripurna sekarang ini harus mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam penetapan mekanisme pemilihan alat kelengkapan Dewan. “Kita inginnya sesuai asas proporsional seperti yang terjadi periode kemarin. Nanti kita akan, mengadakan forum lobi terkait persoalan ini,” ujarnya.

Rapat Paripurna DPR RI, Kamis 16 Oktober 2014, kali ini memiliki tiga agenda diantaranya penetapan jumlah komisi-komisi, Penetapan jumlah dan komposisi anggota Fraksi pada alat kelengkapan Dewan dari tiap-tiap Fraksi, dan Penetapan mekanisme pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. (si) foto: [odjie/parle/iw](#)

## DPR Apresiasi Positif Pembentukan Kementerian Maritim

Anggota DPR dari Partai Golkar Fadel Muhammad menyambut baik adanya usulan pembentukan Kementerian Maritim di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. “Usulan Kementerian Maritim itu harus mengedepankan sektor SDM, dan memiliki warna NKRI artinya Kementerian Maritim harus dapat menjaga kekayaan laut, dan terakhir untuk pariwisata,” ujarnya kepada Parleментарia di Gedung DPR RI, Kamis, (16/10).

Menurutnya, ketiga nuansa baru tersebut harusnya tercermin di Kementerian Perencanaan Maritim



Anggota DPR dari Partai Golkar Fadel Muhammad

nantinya. “Menko Kelautan dan Perhubungan seharusnya memang satu atap di tingkat Menteri Koordinator, bisa saja dibuat deputi yang diambil kementerian terkait dan menyusun semacam juklak kemaritiman,” ujarnya.

Diirinya mengapresiasi positif adanya pembentukan Kementerian Maritim. Melalui rencana ini diharapkan isu Kemaritiman menjadi isu nasional. “Ini muncul wajah baru terkait kemaritiman, selain itu Transportasi laut juga harus diberdayakan agar kembali ke bangsa maritim,” tandasnya. (si) foto: [iwan armanias/parle](#)

## Pimpinan DPR Minta Maaf kepada Presiden SBY

Pertemuan Silaturahmi Pimpinan MPR, DPR dan DPD dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta berlangsung hangat, penuh kekeluargaan. Kesempatan yang baik tersebut digunakan Pimpinan DPR untuk menyampaikan ucapan maaf.

“Pak Fahri dan Pak Zul juga tadi minta maaf kalau Presiden SBY sering dikritik di DPR, itu tidak lain sebagai bagian dari tugas kita di parlemen. Tapi tentu selaku Pimpinan DPR menyampaikan inilah dinamika politik dan tadi Pak Fahri dan Pak Zul meminta maaf atas nama pribadi,” kata Ketua DPR Setya Novanto kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (15/10/14).



Suasana pertemuan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dengan Presiden SBY



Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap segenap komponen bangsa bisa bersama membangun suasana harmonis, rukun dan bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam waktu lima tahun ke depan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan pertemuan silaturahmi dengan Presiden SBY juga akan dilakukan dengan sejumlah tokoh bangsa lainnya. “Iya pertemuan dengan Presiden SBY lebih banyak silaturahmi berkenaan dengan masa jabatan beliau yang akan segera berakhir. Kita mengucapkan terima kasih kepada presiden dan upaya ini juga akan kita lakukan pada tokoh lain agar sejuk dan damai

semuanya,” kata dia.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan upaya mendinginkan tensi bangsa memang sengaja dilakukan terutama menjelang pelantikan presiden terpilih. Itulah sebabnya dirancang sejumlah pertemuan silaturahmi dengan para tokoh bangsa.

“Kita sudah ketemu Pak ARB (Abu Rizal Bakri) beliau akan hadir, Pak Hatta hadir, insha Allah sejumlah tokoh lain akan hadir dalam upacara pelantikan presiden terpilih nanti. Pak Prabowo Jumat nanti kami sudah disediakan waktu untuk bertemu. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga menghadiri pelantikan,” tuturnya.

Presiden SBY yang dalam pertemuan hampir satu setengah jam itu didampingi oleh Wapres Budiono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan ucapan selamat dan harapan.

“Atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada bapak sekalian untuk mengemban tugas sebagai unsur Pimpinan di MPR, DPR dan DPD. Semoga tugas mulia itu bisa diemban dengan baik,” demikian Presiden SBY. (iky) foto:andri/parle/iw

## Belum Mendesak Meningkatkan Harga BBM

Rencana pemerintahan baru Jokowi-JK yang ingin menaikkan harga BBM dinilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon belum mendesak dan tidak logis. Ini lantaran asumsi harga BBM dalam APBN 2015 mencapai 105 USD per barel. Sementara harga minyak dunia masih sekitar 95 USD per barel.

Fadli Zon menyampaikan hal tersebut di DPR usai menerima Delegasi Komnas HAM, Rabu (15/10). Namun, menurut Fadli, pemerintah saat ini tak perlu meminta persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM, karena bukan domain DPR. “Pemerintah tak perlu meminta persetujuan DPR sampai tahun 2015,” ujarnya.

Dengan harga minyak dunia yang masih di kisaran 95 USD per barel, logikanya kenaikan harga BBM belum mendesak untuk dilakukan. APBN telah mematok harga BBM 105 USD per barel. “Apa dasarnya untuk menaikkan kalau asumsinya masih di bawah APBN. Kecuali harga minyak dunia sudah mencapai 140 USD per barel. Nah, ini baru kita mengalami satu defisit yang besar,” papar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut Fadli, masih banyak cara untuk tidak menaikkan BBM, misalnya dengan mengoptimalkan energi alternatif seperti bio etanol, bio fuel. Belum lagi pembenahan distribusi



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

migas yang masih banyak kebocoran. Sektor migas, sambung Fadli, memang masih menyisakan banyak masalah. Ia mencontohkan, banyak perusahaan tambang yang sudah memegang izin tapi tidak melakukan eksplorasi, sehingga alih teknologinya rendah. “Perlahan ini harus dibenahi,” katanya. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## DPR Beri Perhatian Pada Kasus Pelanggaran HAM

Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti pembunuhan Munir, kasus Trisakti dan Semanggi, kasus penculikan, hingga kasus pelanggaran HAM berat di tahun 1965 akan mendapat perhatian serius DPR RI. DPR dan Komnas HAM perlu merumuskan formulasi penyelesaian yang baik.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, Rabu (15/10) di DPR. Didampingi dua wakilnya masing-masing Fadli Zon dan Agus Hermanto, Pimpinan DPR mendengarkan secara menyeluruh berbagai problem yang disampaikan Komnas HAM, termasuk penguatan

lembaga Komnas HAM sendiri.

Hafid menyampaikan, hingga saat ini ada 7000 berkas pengaduan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas. Untuk menindaklanjutinya, Komnas terkendala oleh minimnya sumber daya manusia dan terbatasnya mandat Komnas. Selain itu, dukungan dari



Pimpinan DPR RI foto bersama Komnas HAM

pemerintah sangat kurang terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi Komnas. Apalagi, anggaran bagi Komnas sangat terbatas.

Menurut Setya, Indonesia masih memiliki potret buram atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Untuk itu, dalam kesimpulannya, Pimpinan DPR akan selalu mencermati semua kasus

pelanggaran HAM dan mengagendakan revisi UU No.39/1999 tentang HAM pada tahun ini. Kesimpulan lainnya adalah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih harus dicari format solusinya agar tuntas dan tak mewariskan masalah terus menerus di masa depan.

Berbagai bentuk pelanggaran HAM masih terus mewarnai antara negara dan warganya. Misalnya, kekerasan yang dilakukan aparat baik polisi maupun TNI kepada masyarakat, pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi, hingga pelanggaran yang dilakukan Satpol PP. Konflik agraria di daerah selalu menimbulkan resistensi pelanggaran HAM. Dan yang juga kerap terjadi adalah pelanggaran HAM yang dilakukan kaum mayoritas terhadap minoritas. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iv.

## Pernyataan Pemerintah Arab Jadi Sebuah Masukan

Pernyataan dari pemerintah Arab Saudi yang menyayangkan kekurangan selektifan pemerintah Indonesia dalam meloloskan calon jemaah haji terutama yang mengidap penyakit kronis, menurut anggota DPR RI, Oky Asokawati menjadi sebuah masukan agar ke depannya lebih selektif lagi dalam menerapkan aturan test kesehatan bagi calon jemaah haji.

Meski demikian anggota Fraksi PPP ini juga tidak dapat menyalahkan pemerintah, pasalnya bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan ijin calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke tanah suci memang lebih mengutamakan yang sudah mendaftar lebih dahulu. Karena hal ini berkaitan dengan Kuota.

“Tidak bisa dipungkiri jemaah haji kali ini memang beresiko tinggi, karena memang pemerintah mengutamakan calon jemaah haji yang sudah mendaftar terlebih dahulu plus dilihat dari faktor usia. Ini terkait dengan jumlah kuota. Dan kita tidak bisa menahan seseorang untuk naik haji. Namun jika



Anggota DPR RI, Oky Asokawati

dikatakan test kesehatannya longgar, ini menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan. Akan tetapi menurut saya bukan karena dilonggarkan, tapi karena pemerintah yang memang mengutamakan mereka yang sudah berusia lanjut walaupun beresiko tinggi tadi,”

papar Oky.

Bahkan dilanjutkan Oky, adanya mitos dalam masyarakat Indonesia dimana wafat di tanah suci akan lebih mulia atau lebih baik itu juga menjadi sebuah alasan bagi calon jemaah haji lanjut usia atau beresiko tinggi untuk tetap berangkat ke tanah suci. Malah tidak sedikit yang berharap di tanah suci akan mendapat mukjizat berupa kondisi kesehatan yang lebih baik. Dan menurut Oky, hal tersebut tetap harus dihargai, karena memang pada dasarnya hanya Allah SWT yang mengetahui kematian seseorang.

Namun jika dikatakan bahwa banyaknya jemaah haji yang meninggal di tanah suci itu akan merepotkan pemerintah Arab Saudi, Oky menilai hal itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Hal itu dikatakan Oky sebagai sebuah resiko dan tanggung jawab pemerintah Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji yang melibatkan seluruh negara dan masyarakat dunia. (Ayu)/foto:andri/parle/iv.

# Kirab Jokowi Bukti Pemimpin Tidak Perlu Berjarak Pada Rakyat

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kirab Jokowi adalah sebuah tradisi yang bagus. Rencana mengadakan kirab menunjukkan bahwa seorang pejabat tidak perlu berjarak dengan masyarakat.

“Saya kira itu tradisi yang bagus. Hal itu harus dibiasakan bahwa seorang pemimpin tidak perlu takut kepada rakyat. Itu adalah tradisi yang baik, artinya sebagai pejabat negara tidak perlu berjarak dengan masyarakat,” kata Fahri usai Rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi di ruang rapat Pansus Gedung Nusantara II Senayan, Selasa (14/10).

Politisi PKS ini malah menginginkan pengambilan sumpah Jokowi dilaksanakan di atas tangga DPR agar bisa dilihat oleh seluruh rakyat, relawan dan juga seluruh partai pendukung.

“Saya malah menginginkan pengambilan sumpah Presiden dilaksanakan di tangga Gedung DPR. Bayangan saya seperti di Gedung Putih di Amerika,” ujarnya.

Meskipun kirab yang akan dilakukan pendukung Jokowi adalah hal yang bagus, namun menurut Fahri kirab itu adalah sebuah simbolik. Artinya yang paling penting adalah tugas utama seorang Presiden dalam pengabdian kepada rakyat, bukan sekedar kirabnya saja.

Seperti diberitakan, relawan Jokowi akan melakukan kirab setelah pelantikan pada tanggal 20 Oktober nanti. Dari jadwal yang disusun, para relawan dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Parkir Timur Senayan di pagi hari, lalu bergerak ke Semanggi bersama-sama. Dari Semanggi, relawan akan bergerak menuju Istana Negara



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

mengantar Jokowi-JK. (mp,yd)foto:Iwan Armanias/parle/iw.

## Mitra Kerja Komisi Akan Disesuaikan dengan Kabinet

Rapat Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan fraksi-fraksi telah menetapkan jumlah Komisi tidak akan berubah, yakni 11 Komisi. Meski demikian fungsi dan mitra kerja dari kesebelas Komisi ini akan disesuaikan kemudian hari. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto kepada wartawan usai rapat pimpinan DPR RI, Selasa (14/10).

“Kita akan sesuaikan sebelas komisi itu dengan pembagian fungsi serta mitra kerja dengan sebaik-baiknya. Sehingga anggota dapat menjalankan tugas dan fungsinya juga dengan baik, agar jangan sampai mitra kerja kita dirugikan,” ungkap Setya Novanto.

Novanto menambahkan bahwa penyesuaian fungsi dan mitra kerja Komisi harus dilakukan seiring dengan wacana perubahan susunan kabinet yang akan disusun pemerintahan mendatang. Sebut saja adanya wacana



Ketua DPR RI Setya Novanto

perampingan antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Begitu juga rencana pemisahan Kementerian Pendidikan yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi men-

datang.

Pada rapat kali itu juga ditetapkan jumlah anggota dalam satu komisi, yakni antara 45-55 anggota dalam satu Komisi. Sementara yang berbeda mungkin Baleg (badan legislasi) akan berkembang menjadi 100 orang jumlahnya. Namun saat ini melihat tugas Baleg lebih kepada penyelesaian Prolegnas dan RUU dimana secara teknis semua itu ada di Komisi. Oleh karenanya Novanto menyarankan agar jumlah anggota Baleg sekitar 75 orang saja.

Diungkapkan Novanto, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang tata cara pemilihan pimpinan Komisi. Dimana semua itu diyakini akan didasarkan atas azas ketepatan pada aturan dan tata tertib yang ada, disamping tentunya pembicaraan-pembicaraan dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Warna-warni

Suasana di dalam dan di luar Rapat Paripurna Penetapan jumlah Komisi dan Komposisi Anggota Fraksi pada AKD





# Kekayaan Alam Kalteng Belum Dimaksimalkan Untuk Rakyat



Anggota F-PDI Perjuangan Willy Midel Yoseph

Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sangat kaya dengan sumber daya alam (SDA) berupa hutan ternyata selama ini belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Pemda dan masyarakat setempat sudah berjuang agar sumber daya alamnya bisa dinikmati rakyat, tapi pemerintah pusat masih menghambatnya karena ada aturan tata ruang nasional.

Demikian diungkapkan anggota F-PDI Perjuangan Willy Midel Yoseph di ruang kerjanya, Selasa (14/10). Persoalan yang sudah lama mengemuka di Kalteng adalah Pemda dan masyarakat tak bisa membuka hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Padahal, dengan areal hutan yang sangat luas, pembukaan hutan tak sampai mengganggu lingkungan. Justru itu bermanfaat, karena akan membuka banyak lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat.

“Dari kekayaan SDA sebenarnya Kalteng sangat menjanjikan. Hanya kita melihat pengelolaannya oleh negara belum

merata dinikmati oleh masyarakat. Masih banyak orang yang belum bekerja dan menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri,” papar mantan Bupati Kabupaten Murung Raya, Kalteng ini. Willy mengaku, selama dirinya menjabat bupati 2 periode, masih sulit melakukan akselerasi terhadap aturan tata ruang nasional yang dipegang pemerintah pusat.

Akibatnya, sambung Willy, rakyat di Kalteng miskin karena sulit mencari penghasilan dan pekerjaan. Kalteng yang memiliki luas 151 ribu km<sup>2</sup> atau 1 setengah kali pulau Jawa dengan penduduk sekitar 2 juta jiwa, harusnya bisa mudah disejahterakan. Itu dengan asumsi Kalteng menempati teritorial yang luas, SDM yang melimpah, dan penduduk yang relatif sedikit.

“Di DPR inilah tempatnya. Saya ingin berjuang agar semua orang bisa mengenal Kalteng dan permasalahannya. Masalah utamanya adalah kemiskinan dan akses pendidikan yang belum dinikmati sepenuhnya oleh rakyat Kalteng. Ini berhubungan pula dengan masalah infrastruktur dan lapangan kerja.”

Legislator dari dapil Kalteng ini, berharap, pemerintahan Jokowi-JK pada 5 tahun mendatang akan membawa perubahan mendasar bagi kesejahteraan rakyat Kalteng. Dan dari gedung DPR RI, Willy pun berjanji akan memperjuangkan nasib rakyat yang diwakilinya. Ia akan memperjuangkan nasib rakyat Kalteng dengan ikut merumuskan regulasi-regulasi terkait kepentingan daerahnya.

Untuk itu, kelak bila komisi-komisi di DPR sudah terbentuk, ia ingin menempati Komisi IV yang membidangi pertanian dan kehutanan atau Komisi X yang membidangi pendidikan. “Kami sangat mendambakan agar tata ruang Kalteng sesuai dengan peruntukan dan kemauan masyarakat di sana, terutama untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Membawa aspirasi masyarakat Kalteng adalah target dan janji politik saya,” tandas Willy. (mh) foto: naefuroji/parle/iw

## DPR Desak Tingkatkan Kerjasama Tangani Virus Ebola

Bahaya yang ditimbulkan oleh penyebaran virus Ebola merupakan ancaman nyata terhadap masyarakat internasional. Menanggapi hal ini, diperlukan upaya dari seluruh negara untuk melakukan kerjasama serta memberikan bantuan nyata kepada negara-negara yang saat ini menjadi korban dari penyebaran virus Ebola (*affected countries*).

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPR-RI Hidayat Nur Wahid, saat mewakili Delegasi RI dalam pembahasan mata acara khusus (*Emergency Item*) Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-131 dengan topik “*the role of parliaments in supporting an immediate an robust international response to the Ebola epidemic*”, Selasa (14/10/14) di Jenewa, Swiss.

Politisi F-PKS ini menambahkan bahaya yang ditimbulkan Ebola memiliki berbagai dimensi, baik dimensi kemanusiaan maupun dimensi sosial, yang harus ditangani secara bersamaan.

“Sebagai bagian dari masyarakat internasional, para anggota parlemen di seluruh negara anggota IPU memiliki peran yang sangat penting



Anggota DPR Hidayat Nurwahid

dalam rangka memperkuat sistem kesehatan di negaranya masing-masing secara menyeluruh, terutama melalui pembahasan dan pengesahan berbagai hukum nasional yang akan memperkuat kebijakan nasional di bidang kesehatan,” jelas Hidayat.

Selain berpartisipasi pada pem-

bahasan *Emergency Item* tersebut, Delegasi Indonesia juga berpartisipasi pada berbagai pertemuan yang membahas berbagai isu lainnya, antara lain berpartisipasi pada pertemuan *IPU Standing Committee on United Nations Affairs*; *IPU Standing Committee on Peace and International Security*; serta *IPU Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade*.

Khusus pada pertemuan *IPU Standing Committee on UN Affairs*, Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Anggota DPR-RI Evita Nursanty, telah menyampaikan beberapa pandangan Indonesia terkait dua isu yang dibahas.

Pada isu terkait “*Promotion of a democratic and equitable international order*”, ditekankan bahwa isu *self-determination* tidak dapat diartikan secara sempit, mengingat hal tersebut harus dilihat dari perspektif keutuhan wilayah suatu negara yang berdaulat (*sovereignty and territorial integrity*).

Delegasi Indonesia menyayangkan bahwa laporan *UN Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable order* pada tahun 2013 menyarankan agar Sidang Majelis Umum PBB melakukan kajian ulang terhadap isu Papua Barat.

“Bagi Indonesia, Papua Barat merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia yang berdaulat dan bukan lagi menjadi isu yang perlu diperdebatkan lagi oleh masyarakat internasional,” tegas Evita.

Pada saat pembahasan isu *the Role of Corporations in UN Decision-Making*, Delegasi Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan kalangan pengusaha (*private sectors*) yang bergerak di bidang pertambangan/*extractive industries*.

“Perlu adanya upaya bersama untuk memperkuat legislasi di tingkat nasional ataupun internasional untuk menjaga agar kegiatan *private sectors* tersebut dilakukan secara wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia di daerah pertambangan,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Sidang *Inter-Parliamentary Union (IPU)* ke-131 berlangsung pada 11 – 16 Oktober 2014 di Jenewa, Swiss. Pada Sidang IPU tahun ini, Delegasi Indonesia masih terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pencalonan anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf untuk menduduki jabatan Presiden IPU periode 2014-2017. (sf) foto: eka hindra/parle/iw

## Delegasi Indonesia Serukan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Sidang Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) ke-VIII menghasilkan Deklarasi tentang “*The Role of Parliaments in Fostering Europe-Asia Dialogue, Sustainable Growth and Stronger Governance Structures* yang berisi kesepakatan dan harapan dari parlemen di kawasan Asia dan Eropa.

Kesepakatan itu antara lain terkait pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan. Deklarasi ini juga menekankan isu ketahanan pangan yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam kesempatan ini, Delegasi Indonesia mengusulkan perlunya perhatian terhadap isu pengecualian sosial di samping kemiskinan yang timbul dalam krisis dan perhatian khusus terhadap masyarakat lokal yang dirugikan sebagai akibat krisis ekonomi. Pendekatan produksi yang diusulkan oleh Delegasi Indonesia adalah untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.



Delegasi Parlemen Indonesia di Sidang ASEP

Perlu dipertimbangkan juga diversifikasi produksi yang berbasis pola konsumsi masyarakat lokal, mengingat bahwa

Indonesia berpenduduk lebih dari 250 juta orang dan memiliki pola konsumsi yang beragam. Selain itu, Delegasi Indonesia turut menyampaikan posisi Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN terhadap keinginan negara Uni Eropa yang ingin berpartisipasi dalam *The East Asia Summit* yang semula diumumkan dalam deklarasi.

Dalam sesi Panel Pertama yang membahas Struktur Tata Kelola Ekonomi dan Keuangan (*Economic and financial governance structures*), Delegasi Indonesia menyuarakan aspirasi negara-negara berkembang dalam membangun kewaspadaan terhadap potensi resiko di pasar global. Untuk itu diperlukan *coordinated regional responses to crisis* serta kebijakan yang kuat dari setiap negara untuk menghadapi tantangan jangka menengah dan jangka panjang, dan *globally coordinated policy measures* untuk mengatasi krisis keuangan global.

Selain itu, kerja sama ekonomi re-

gional perlu diperkuat tidak hanya di antara negara berkembang namun juga dengan negara-negara maju guna menciptakan stabilitas makro ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan *regional financial arrangement* (RFAS) dan penciptaan *bilateral safeguard*.

Pada panel kedua yang membahas Pertumbuhan dan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan (*Sustainable growth and food security*), Delegasi Indonesia diwakili oleh Meutya Viada Hafid, yang bertindak sebagai co-chair mewakili kawasan Asia bersama Finlandia. Meutya menekankan pentingnya kemitraan untuk pertanian dan ketahanan pangan.

“Indonesia mendukung sepenuhnya upaya untuk meningkatkan kemitraan Asia-Eropa dalam mencapai pertumbuhan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui pembangunan pertanian yang inklusif pada kawasan Asia dan Eropa. Melalui inisiatif sejenis ASEAN Plus Three Emer-

gency Rice Reserve (APTERR) sebagai bentuk kerja sama regional dalam kawasan Asia dan Eropa untuk mencapai ketahanan pangan global,” jelas Meutya.

Sidang ASEP ke-VIII telah diselenggarakan pada Senin-Selasa (6-7/10/2014) di Roma, Italia. Sidang yang dihadiri oleh 41 negara anggota ASEP dari kawasan Asia dan Eropa. Sidang mengambil tema “*The Role of Parliaments in Fostering Europe-Asia Dialogue, Sustainable Growth and Stronger Governance Structures*”. Selain itu, delegasi dari Kroasia dan Kazakhstan yang terhitung sebagai anggota baru ASEP, juga turut hadir sebagai peninjau.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengirimkan tim delegasi yang dipimpin oleh Evita Nursanty (F-PDIP), dengan anggota terdiri dari Jefirstson Richset Riwu Kore (F-PD), Meutya Viada Hafidz (F-PG), dan Vanda Sarundajang (F-PDIP). (sf) foto: dok./parle/iw.

## Peraturan Poligami Bupati Lotim Harus Dicabut

Peraturan Bupati Lombok Timur (Lotim) NTB No.26 tahun 2014 yang membolehkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk berpoligami dengan membayar Rp 1 juta rupiah dinilai anggota DPR RI, Dwie Aroem Hadiatie ini sebagai sebuah tindakan yang aneh.

Menurut Aroem, begitu ia biasa disapa, selain tidak ada urgensi nya, peraturan bupati Lotim ini malah akan memudahkan PNS untuk berpoligami, hingga akhirnya akan merugikan perempuan. Pasalnya, uang sejumlah 1 juta rupiah itu dinilai Aroem terlalu kecil dan ringan. Sehingga bukan tidak mungkin akan menjadi pemicu PNS daerah tersebut untuk berpoligami.

“Peraturan itu dasarnya apa? Jika dikatakan untuk meningkatkan PAD (pendapat asli daerah) apa iya denda yang hanya 1 juta ini dapat meningkatkan PAD? Saya tidak yakin demikian. Lain lagi kalau denda yang dimaksud berkisar 200 juta-an, pasti akan menambah PAD sekaligus akan menimbulkan efek jera bagi PNS lain yang ingin berbuat serupa. Selain itu dari segi gender ini sangat merugikan perempuan, terutama berkaitan dengan dampak dari poligami yang dilakukan suaminya,” jelas politisi dari Fraksi Partai Golkar saat dihubungi Rabu (15/10).

Oleh karena itu ditambahkan Aroem Peraturan Bupati Lotim No.26 tahun 2014 itu harus dicabut dan batal demi



Anggota DPR dari F-PG Dwie Aroem Hadiatie

hukum, karena bertentangan dengan peraturan di atasnya, baik itu Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1983, UU Perkawinan, serta UU Aparatur Sipil Negara (ASN). (Ayu) foto:andri/parle/iw.



# Setelah Jokowi Dilantik, Reaksi Pasar Akan Positif

Anggota DPR Abubakar Al-Habsyi mengatakan, respon negatif pasar atas gejolak politik di dalam negeri sebagai hal yang wajar. "Itu konsekuensi logis dari pasar. Pasar itu sangat mengikuti perkembangan apakah politik, cuaca alam atau apapun. Saya melihat sebagai hal yang wajar dan berjalan tidak akan lama," katanya sesuai mengikuti Rapat Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi Selasa (14/10) siang.

Menurut politisi Fraksi PKS ini, setelah pertemuan Pimpinan MPR, DPR dan DPD yang mempersiapkan pelantikan Presiden, dia yakin dan percaya, waktu fluktuatif hanya sebentar dan perekonomian akan berjalan normal lagi.

Lebih lanjut dikatakan, investor pertimbangannya panjang dan kata Abubakar, respon pasar yang negatif hanya berlangsung sebentar. "Setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden 20 Oktober mendatang dan diumumkan komposisi menteri maka itu akan ter-



Anggota DPR Abubakar Al-Habsyi

lihat bagaimana reaksi pasar," ujarnya optimis.

Menanggapi munculnya isu bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) akan meneghal pelantikan Jokowi, dengan tegas Abubakar membantahnya. "Nggak ada, sebab KMP akan mengantar

Jokowi jadi Presiden dan kita di DPR akan menjadi penyeimbang pemerintahan. Artinya selama kepemimpinan Presiden Jokowi berjalan baik dan program-programnya bagus, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan pasti mendukungnya. Kecuali ada catatan dan masalah, disitulah peran pengawasan, *budgeting* dan legislasi DPR," tegasnya.

Dia kembali menyatakan keyakinannya bahwa pelantikan Presiden akan berjalan dengan baik dan bersama jajaran kabinetnya dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik pula.

Terkait dengan pemilihan Pimpinan AKD, sudah dimusyawarahkan dan akan diputuskan dalam rapat paripurna. Saat ditanyakan apakah KMP akan sapu bersih pimpinan AKD di DPR, Abubakar mengatakan, "Soal sapu bersih atau tidak, itu tergantung musyawarahnya," ia menjelaskan. (mp)/  
foto: iwan armanias/parle/iw.

## Bersyukur Tak Ada Pemekaran Komisi



Anggota DPR Syarifuddin Suding

Wacana dan gagasan pemekaran komisi di DPR sudah ditolak. DPR tetap dengan jumlah Komisi yang ada, yaitu 11 komisi. Semangat pemekaran komisi sangat bertentangan dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK yang justru ingin merampingkan struktur

kementerian dan lembaga.

Demikian disampaikan Syarifuddin Suding (F-Hanura) saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/10). Wacana pemekaran komisi menurut mantan anggota Komisi III DPR ini, sangat jauh dari semangat efisiensi "Berapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk satu komisi saja, karena ada rekrutmen staf dan sebagainya. Saya kira itu pemborosan."

Ketika Presiden terpilih Jokowi sedang semangat merampingkan struktur pemerintahannya, mengapa wacana itu tiba-tiba muncul. Keberadaan komisi di DPR, papar Suding, harus menyesuaikan dengan kementerian dan lembaga yang dibentuk pemerintah. bukan justru sebaliknya. "Nah, kalau di sana sudah dirampingkan, di sini dimekarkan, di mana korelasinya,"

katanya penuh tanda tanya.

Komisi III yang sempat disebut-sebut oleh koalisi pengusul, memiliki terlalu banyak mitra kerja dan karenanya harus dimekarkan, tetap tidak logis. Dalam pandangan Ketua F-Hanura di MPR itu, yang justru mendesak untuk dibenahi adalah kedisiplinan para anggota dalam menghadiri setiap rapat di DPR.

"Kita sering risih dengan mitra kerja karena lebih banyak mitra kerja yang hadir daripada anggota. Paling 5-10 orang saja anggota yang hadir dari 50 orang anggota. Bagaimana bila dimekarkan, anggota yang hadir bisa 1-2 orang saja. Apa kita tidak malu dan membuat citra DPR semakin rusak di mata publik," tandas Suding mengakhiri wawancara. (mh)/foto: naefurodji/parle/iw.

# Fraksi PKB Berharap Komisi Dibagi Proporsional

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI akan memperjuangkan pembagian pimpinan komisi dilakukan melalui mekanisme proporsional. Langkah tersebut dianggap penting sebagai upaya untuk mendukung demokrasi yang stabil di parlemen.

“Kebutuhan kita menciptakan demokrasi yang stabil, nah itu harus ada kebersamaan dalam mengelola setiap keputusan politik di DPR. Ketika distribusi kepemimpinan itu basisnya adalah proporsionalitas - perolehan kursi masing-masing partai, saya kira lebih menjamin parlemen yang stabil,” kata Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri usai menghadiri acara Makan Malam dengan Dubes di Pustakaloka, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/14).

Ia kemudian mengajak semua pihak untuk melihat pengalaman DPR periode 2009-2014 yang juga terbelah menjadi Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan. Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR yang disepakati kedua belah pihak pada saat itu adalah pendekatan proporsional.

“Relasi diantara kekuatan politik di DPR itu basisnya 5 lima tahun, akan sangat baik kalau proses politik bisa mencari titik temu pada yang namanya konsensus. Nah, untuk bisa mendapatkan konsensus maka proporsionalitas menjadi penting,” ujar dia.



Anggota Fraksi PKB Hanif Dhakiri

Hanif yang juga Sekretaris Jenderal PKB ini menyebut akan membangun komunikasi dengan sembilan fraksi lain di DPR agar muncul kesepahaman mengenai persoalan ini. Ia berharap dalam rapat konsultasi yang melibatkan Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi dapat dicapai titik temu. (iky)/foto: iwan armanias/parle/iw.

# Parlemen Indonesia Upayakan Keterwakilan di IPU

Setelah berupaya untuk memenangkan pencalonan Dr. Nurhayati Assegaf, Delegasi DPR RI yang dihadiri Surahman Hidayat, Nurhayati Ali Assegaf, Hidayat Nurwahid dan Hendrawan Supratikno, dalam Pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-131 di Jenewa juga mengupayakan keanggotaan Parlemen Indonesia dalam beberapa *Standing Committee* IPU.

Dukungan dimintakan dalam berbagai pertemuan kelompok regional, antara lain Kelompok ASEAN + 3 (Korea, Jepang, China), Kelompok Asia dan Pasifik serta negara-negara Islam (PIUC), Minggu (12/10).

Selain itu juga merupakan kesempatan besar bagi Parlemen Indonesia



Anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf di Sidang IPU

untuk ikut serta menyuarakan kepentingan bangsa serta berkontribusi dalam hasil-hasil pertemuan terkait berbagai isu-isu global.

Delegasi Parlemen Indonesia juga berkontribusi aktif dalam diskusi pada *Meeting of Women Parliamentaria* yang dihadiri Nurhayati Ali Assegaf, Okky Asokawati, Evita Nursanty, Chusnunia Chalim dan Vanda Sarundajang yang berkaitan dengan isu Kuota Keterwakilan Perempuan dalam politik.

Disamping itu juga delegasi parlemen menyampaikan bahwa UU Pemilu di Indonesia menetapkan bahwa ma-

sing-masing partai politik dialokasikan minimum 30% pencalonan perempuan dalam daftar calon tetap di setiap dapil DPR/DPD.

Pada keanggotaan DPR periode 2014-2019 ini mengalami penurunan, perempuan meraih sekitar 17,3 persen dari 560 kursi parlemen yang tersedia, dibandingkan dengan 18 persen atau 103 orang pada periode 2009-2014.

Penurunan ini menunjukkan perlu adanya pendekatan baru dalam kehidupan politik di Indonesia agar kembali mendorong partisipasi yang besar dari kalangan perempuan. Kendati

hambatan dan tantangan bagi keterpilihan perempuan dalam parlemen tidak secara otomatis teratasi dengan dikeluarkannya peraturan teknis yang secara formal ditujukan untuk mengawal proses pencalonan perempuan.

Arsi Dwinugra Firdaus, Sekretaris Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional seusia mendampingi Delegasi Parlemen RI, mengatakan bahwa duduknya anggota parlemen Indonesia dalam berbagai *standing committee* sangat penting untuk mengangkat Profil Parlemen Indonesia. (hr/bs)/foto:eka hindra/parle/iw.

## Parlemen Negara Amerika Latin dan Karibia Dukung Nurhayati Presiden IPU

Nurhayati Ali Assegaf menyambut baik dukungan yang diberikan negara-negara yang tergabung dalam *the Latin-America and Caribbean Geopolitical Group* (Grullac) bagi dirinya untuk menjadi Presiden IPU periode 2014 – 2017 yang berlangsung di Jenewa Swiss, Sabtu (11/10).

Dalam pertemuan tersebut, Nurhayati juga menawarkan tentang komposisi di Sekretariat IPU bila dirinya terpilih menjadi presiden IPU. “Jika saya jadi presiden IPU, hal ini akan saya perhatikan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota Delegasi Indonesia dalam sidang IPU di Jenewa Swiss, Hendrawan Supratikno. Hendrawan menilai paparan Nurhayati Ali Assegaf sebagai kandidat Presiden IPU di sidang *The Latin-America and Caribbean Geopolitical Group* (Grullac) direspon positif oleh sejumlah delegasi negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Menurut Hendrawan, sosok Nurhayati sudah cukup dikenal di wilayah tersebut.

“Nurahayati sangat dikenal oleh delegasi Amerika Latin. Jadi responnya sangat positif, dan saya lihat dari pembicaraan *person to person*, mereka (delegasi Amerika Latin dan Karibia) juga akan berjuang menyukseskan Nurhayati men-



Anggota F-PD Nurhayati Ali Assegaf

jadi Presiden IPU,” jelas Hendrawan.

Untuk menyukseskan Nurhayati Ali Assegaf sebagai Presiden IPU, delegasi Indonesia juga melakukan pendekatan dengan delegasi Jepang guna mendapat dukungan dalam pemilihan. (bs/eh)/foto:eka hindra/parle/iw.

## Dubes Austria : Dinamika DPR adalah Biasa

Duta Besar Austria untuk Indonesia Andreas Karabaczek menilai dinamika yang terjadi di DPR RI dalam dua minggu terakhir adalah suatu yang wajar. Kondisi seperti itu menurutnya meru-

upakan ciri utama sebuah parlemen di negara demokrasi.

“Iya, saya mengamati apa yang terjadi di DPR. Ini dinamika parlemen

yang biasa terjadi dimanapun. Kalau anda pikir parlemen adalah tempat semua orang setuju, berarti anda tidak di parlemen,” katanya usai mengikuti Jamuan Makan Malam di Pustakaloka,



Dubes Austria untuk Indonesia  
Andreas Karabaczek

Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/13).

Baginya sehebat apapun dinamika parlemen bisa dipastikan mereka adalah perwakilan dari masyarakat yang akan bekerja untuk rakyat dan negaranya. Pemerintahpun sebenarnya juga akan melakukan hal yang sama. Ketika dua hal ini dipertemukan maka hasilnya adalah kerja sama yang produktif untuk rakyat.

Sebelumnya dalam paparannya anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut penggambaran media terhadap apa yang terjadi di parlemen tidak semuanya pas. “Situasi di DPR tidak seburuk yang digambarkan beberapa media. Anda bisa merasakan suasana pertemuan malam ini semua kelihatan baik dan luar biasa,”

ungkapnya.

Ia berharap komunikasi antara DPR dengan para diplomat yang bertugas di Indonesia dapat terjalin dengan baik. Apabila ada pertanyaan yang perlu segera dikonfirmasi anggota Komisi I pada periode lalu ini menyatakan siap membuka diri, termasuk kontak langsung melalui telepon.

Acara jamuan yang sekaligus perkenalan pimpinan DPR periode 2014-2019 itu berlangsung dalam suasana yang hangat. Para pejabat terlihat berbincang akrab dari meja ke meja dan saling bertukar kartu nama. Para tamu, duta besar juga menikmati sajian hiburan budaya Indonesia seperti Tari Piring dan Jaipong. (iky)/foto:andri/parle/iw.

## Peliputan Kegiatan DPR Lebih Baik Dibanding Sejumlah Negara



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti di Sidang ASGP

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menilai kebebasan pers dalam meliput kegiatan Dewan di Indonesia masih lebih baik dibanding se-

jumlah negara. Bahkan negara seperti Myanmar, Afghanistan dan Thailand beberapa kali melakukan studi banding ke Sekretariat Jenderal DPR guna

melihat langsung proses sidang dan peliputan di DPR RI.

“Masyarakat sangat mudah mengakses karena di *publish* melalui *website*,” kata Winantuningtyastiti usai pertemuan *Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP)* di Jenewa, Swiss (13/10).

Selain mempelajari tentang tata cara peliputan di DPR RI, negara-negara tersebut juga mempelajari fungsi dukungan Sekretariat Jenderal kepada Dewan.

Lebih jauh, saat menanggapi paparan Sekretaris Jenderal Parlemen Estonia terkait *Public access to Records of Committee Meetings, a Case Study From Estonia*, Winantuningtyastiti menjelaskan, Estonia memiliki permasalahan yang sama dengan Indonesia, dimana ada Undang-Undang tentang Kebebasan Informasi Publik.

“Saat ini mereka (Estonia) sedang digugat di Mahkamah Agung Estonia agar Undang Undang yang berlaku direvisi,” jelasnya. (bs/eh)/foto:eka hindra/parle/iw.



# Puan Maharani Kembali Pimpin Fraksi PDI Perjuangan DPR

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani kembali memimpin Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI periode 2014-2019. Fraksi ini berjumlah 109 orang anggota sementara 3 orang belum dilantik sehingga sekarang ini beranggotakan 106 orang.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto pekan lalu, ditetapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani, Sekretaris Bambang Wuryanto dan Wakil Sekretaris Utut Adianto. Dua fraksi lainnya ditetapkan dan disahkan dalam acara ini adalah Fraksi PKB dan Fraksi Partai Hanura. Sementara 7 fraksi lain sudah ditetapkan dalam rapat paripurna sebelumnya.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar (F-PG) jumlah Anggota 90 orang, Ketua Fraksi Ade Komarudin, Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra) beranggotakan 73 orang. Ketua Fraksi Ahmad Muzani dan Sekretaris Fary Djemi Francis.

Fraksi Partai Demokrat (F-PD) berjumlah 60 orang anggota, Ketuanya Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Didik Mukriyanto serta Bendahara Anton Supratono.

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) terdiri 48 orang anggota dengan Ketua Tjatur Sapto Edy, Sekretaris Teguh Juwarno dan Bendahara Dewi Coryati.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dipimpin Ketua Fraksi Marwan Dja'far, Sekretaris Hanif Dahiri dan Bendahara Chusnunia Chalim, jumlah Anggota 47 orang



Anggota F-PDI Perjuangan Puan Maharani dalam Sidang Paripurna

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS) jumlah anggotanya 40 orang dengan Ketua Hidayat Nur Wahid.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) jumlah anggotanya 39 orang, dengan Ketua Hasrul Azwar, Wakil Ketua Saifullah Tamliha dan Sekretaris Arwani Thomafi.

Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) jumlah anggotanya 36 orang Ketua Victor Laiksodat, Sekretaris Abdullah Al Fajri dan Bendahara Ahmad Syahroni

Sementara Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) ditetapkan Ketuanya Dosi Iskandar Prasetyo, Sekretaris Saleh Husin, jumlah anggotanya 16 orang. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Nurhayati Kembali Dapat Dukungan Negara Sahabat

Calon presiden IPU periode 2014-2017 dari Indonesia Nurhayati Ali Assegaf mendapat dukungan sejumlah negara sahabat diantaranya Jepang, negara-negara di wilayah Arab dan Afrika serta Asean+3 dan sejumlah negara yang tergabung dalam G-12. Delegasi Indonesia dari DPR RI telah menghadiri beberapa pertemuan guna mensosialisasikan Nurhayati sebagai calon Presiden IPU dalam Sidang IPU ke-131 di Jenewa 13 - 16 Oktober 2014.

Selain Dr. Nurhayati (Demokrat), kandidat lain yang telah mengajukan pencalonannya untuk posisi tersebut adalah anggota Parlemen dari Australia, Bangladesh dan Maldives (Maladewa).



Anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf

Terkait pencalonannya tersebut, Dr. Nurhayati serta para kandidat lainnya telah diundang untuk memberikan presentasi mengenai visi dan misinya di depan berbagai kelompok negara anggota IPU.

Kelompok itu antara lain *Group of Latin America and the Caribbean (GRU-LAC)*, *Asia-Pacific Group*, *Arab Group*, *Twelve Group*, *African Group*, serta kelompok *Women Parliemantarian*.

Pemilihan Presiden IPU akan berlangsung pada 16 Oktober 2014 melalui *secret ballot* (proses pemungutan suara secara tertutup) para delegasi IPU. (bs/eh)/foto:eka hindra/parle/iw.

# Lembaga Penegak Hukum Jangan Tebang Pilih



Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto menerima aktifis Progres 98

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, lembaga penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan seseorang. Bahkan, pejabat negeri di lingkup eksekutif, yudikatif, maupun legislatif pun harus diproses secara hukum, jika diduga melakukan tindakan korupsi.

Hal itu ia sampaikan usai menerima pengaduan Ketua Pelopor Rachmawa-

ti Soekarnoputri dan sejumlah aktifis Progres 98 di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kamis (9/10/14). Rachmawati menyampaikan Petisi Rakyat Menggugat terkait hasil Pemilihan Umum Presiden 2014, yang diselenggarakan 9 Juli lalu.

“Kami menerima Ibu Rachmawati yang menyampaikan aspirasi tentang berbagai hal, dan disertai berbagai dokumen. Kami menghargai itu, dan

segera menindaklanjuti. Termasuk dugaan adanya kasus-kasus hukum yang tidak ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum,” jelas Fadli.

Politisi Gerindra ini menyatakan, pihaknya akan segera klarifikasi hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung, tentang kasus-kasus yang disampaikan oleh Rachma.

“Ada laporan masyarakat, ada buktinya, namun belum ditindaklanjuti. Kenapa tidak ada tindakan dari lembaga penegak hukum? Jangan sampai ini terkesan tebang pilih. Kasus korupsi yang melibatkan setiap orang, hukum harus ditegakkan. Jangan sampai KPK dituduh tebang pilih,” tegas Fadli.

Sebelumnya, Fadli yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Anggota DPR Azis Syamsuddin menerima aspirasi dari Rachmawati terkait Pilpres 2014. Rachmawati menyatakan banyak kecurangan terjadi pada Pilpres.

“Petisi Rakyat Menggugat isinya menyoroti proses dan hasil Pilpres 2014. Kami menemukan banyak bukti kecurangan,” jelas Rachmawati. (sf)  
*foto:andri/parle/iw.*

# Pasar Menguat Kembali Saat Peralihan Dimulai

Respon pasar yang sempat turun seiring polemik dan kisruh di parlemen, diyakini segera akan menguat kembali saat peralihan kekuasaan dimulai dari Presiden SBY kepada Presiden terpilih Jokowi. Mantan Gubernur DKI ini selalu mendapat respon positif dari pasar domestik dan internasional.

Demikian penegasan Anggota DPR RI Imam Suroso (F-PDI Perjuangan) saat dihubungi lewat saluran telepon Jumat (10/10). Kisruh di panggung politik nasional memang sempat membuat nilai tukar rupiah dan investasi turun. Ini respon yang wajar setiap kali mencermati dinamika politik terutama yang terjadi di parlemen.



Anggota F-PDI Perjuangan Imam Suroso

“Saya optimis pasar akan menguat kembali. Bila pasar sempat merespon negatif, itu sifatnya hanya sementara. Segera setelah Jokowi resmi dilantik sebagai presiden, ia akan bekerja keras dan cepat,” papar Imam. Apalagi, lanjut Imam, Jokowi sangat didukung oleh rakyat yang telah memilihnya pada Pilpres lalu. Dan hendaknya para anggota DPR juga menyadari tentang strategisnya respon pasar ini bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika ditanya soal adanya wacana kalangan oposisi yang ingin menjegal pemerintahan Jokowi, mantan anggota Komisi IX DPR ini, menyatakan, khawatir itu memang ada. Tapi, tak perlu direspon berlebihan, karena di

belakang pemerintahan Jokowi nanti ada rakyat. “Rakyat akan marah kepada siapa saja yang mengganggu program-program kerakyatan dari Jokowi. Rakyat akan makmur sejahtera, bahkan disegani negara-negara asing di bawah pemerintahan Jokowi,” imbuhnya.

Menurut Imam lagi, kepemimpinan Jokowi sudah teruji di DKI Jakarta saat menjadi gubernur. Selama pemerintahan Jokowi tidak korup semuanya akan baik-baik saja. Apalagi Jokowi didukung ekonom senior Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden terpilih yang sangat menguasai program ekonomi kerakyatan. (mh)/foto:andri/parle/iw.

## Pimpinan MPR, DPR, DPD Bahas Keamanan Pelantikan Presiden

Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI siap melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pimpinan di tiga lembaga parlemen tersebut membahas bersama konsep keamanan terpadu di kompleks parlemen Senayan.

Rapat Pimpinan MPR, DPR dan DPD dipimpin Ketua DPR RI Setya Novanto di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jumat (10/10). Bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, dibahas berbagai konsep keamanan sebelum dan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Usai pertemuan para pimpinan tersebut menggelar konferensi pers untuk menyampaikan konsep keamanan yang dimaksud.

Setya menyebutkan, ada dua rencana pengamanan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. “Jangka pendek adalah pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 20 Oktober 2014. Jangka panjang adalah konsep keamanan terpadu yang didukung oleh teknologi di lingkungan kompleks gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD RI. Para Sekjen MPR, DPR, dan DPD akan berkumpul dengan pihak Kepolisian dan Kodam Jaya untuk menjadikan satu atap dalam pelaksanaan keamanan,” ungkap Setya.

Namun, konsep keamanan ini tentu tidak menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke parlemen. Ancaman keamanan unjuk



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Pimpinan MPR dan DPD dalam Jumpa Pers

rasa pada saat pelantikan Presiden akan dihadapi aparat keamanan tanpa senjata api. Petugas keamanan maksimal akan menggunakan *water canon* untuk menghalau aksi demonstrasi yang tidak tertib.

Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan langkah prepentif dan persuasif untuk menghindari jatuh korban saat mengamankan berbagai gangguan selama acara pelantikan.

“Keamanan harus betul-betul soft untuk mewujudkan situasi yang kondusif dengan perkiraan ancaman antara lain unjuk rasa, teror bom, boikot, bentrok massa, kebakaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, pengrusakan, dan penyusupan,” papar Setya lagi.

Sementara itu jumlah personil gabungan yang akan diterjunkan mengamankan pelantikan Presiden berjumlah 23.000 personil, baik dari

Kepolisian maupun TNI. Bahkan, untuk mengamankan kompleks parlemen telah dibuat 5 ring keamanan. “Dijamin semuanya aman. Ini saatnya kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia bahwa pelantikan ini

diharapkan betul-betul lancar.”

Selain Ketua DPR, hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dua Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dan E.E. Mangindaan,

serta dua Wakil Ketua DPD, Ratu Hema dan Farouk Muhammad. Hadir pula Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Teddy Lhaksama dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Unggung Cahyono. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## DPR Tunda Penetapan Komposisi Anggota Fraksi di AKD

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Fraksi-fraksi memutuskan menunda penetapan komposisi anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Hari Selasa, (21/10) mendatang setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK.

“Soal Mekanisme pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sudah diketok di Paripurna tadi, yang utama landasan hukumnya, kita ingin mengedepankan musyawarah mufakat apabila tidak bisa baru voting tetapi dengan sistem paket,” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto usai Rapat Konsultasi di Ruang Pansus B DPR RI, Kamis, (16/10).

Menurutnya, Bisa saja alat keleng-



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

kan dibagi secara proporsional semua tergantung koordinasi internal didalam Komisi dan antar Fraksi.

“Para Pimpinan harus keliling di

Komisi yang membidangnya untuk mengetok hasil pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, sekarang yang disiapkan daftar anggota calon masing-masing Komisi ini yang akan di setor namanya Hari Senin, (20/10). Esok harinya baru penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan,” ujarnya.

Berdasarkan Tatib DPR, Komisi akan dibentuk dan diketok pada rapat paripurna nanti, setelah Fraksi memberikan daftar nama anggota Komisinya. Nantinya pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan akan dilaksanakan di komisi masing-masing. “Penetapan komposisi alat kelengkapan ini tidak ada hubungannya dengan Kabinet seharusnya tadi memang sudah disepakati,” urainya. (Sugeng) foto: iwan armanias/parle/iw

## Penetapan Pimpinan AKD Kedepankan Prinsip Kesepahaman

Paket Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan harus mengedepankan prinsip kesepahaman antar Fraksi di DPR.

Pendapat itu disampaikan oleh Anggota DPR Ridwan Bae dari Partai Golkar kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis, (16/10). “Kita juga lagi menunggu dan berharap paket pimpinan juga harus dilandasi kesepahaman,” ujarnya.

Menyinggung kepemimpinan Jokowi-JK, lanjut Ridwan, harus lebih baik dibandingkan kepemimpinan SBY. “Pemerintahan lalu terkesan tidak memiliki ketegasan semoga saja dengan adanya Jusuf Kalla sebagai Wapres, dapat semakin cepat dan tegas dalam mengambil kebijakan,” harapnya.

Kedepan Jokowi, lanjutnya, harus mengedepankan ketahanan bangsa khususnya di sektor ekonomi. “Kita masih banyak potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Seperti diketahui, hasil rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Fraksi-fraksi akhirnya memutuskan menunda pen-



Suasana Rapat Paripurna DPR RI

tapan jumlah dan Komisi Anggota Fraksi pada alat kelengkapan Dewan pada Hari Selasa, (21/10) mendatang setelah pelantikan Jokowi-JK. (si) foto: iwan armanias/parle/iw

# DPR Gelar Pertemuan Dengan Duta Besar Negara Sahabat



Duta Besar Negara Sahabat sedang memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan DPR

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat beserta segenap Anggota DPR menggelar pertemuan dengan 91 Duta Besar Negara Sahabat. Pertemuan bertajuk *gala dinner* itu berlangsung di Pustakaloka, Gedung Nusantara V, Senen (13/10/14) malam.

Hadir pada pertemuan ini Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Turut hadir pula Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, serta beberapa Anggota DPR, diantaranya Tantowi Yahya, Hanif Dhakiri, Roem Kono, Saleh Husin, Edhie Baskoro Yudhoyono dan lain-lainnya.

“Kita berinisiatif untuk mengundang Duta Besar negara sahabat. Sebanyak 91 Duta Besar yang hadir memberikan apresiasinya kepada DPR. Kami juga akan menjalin kerjasama dengan para negara sahabat,” kata Setya, saat ditemui usai acara.

Dalam pidatonya, Setya memberikan apresiasinya atas kedatangan para Dubes di Kompleks Parlemen. Ia juga

sempat menjelaskan, bahwa tahun ini Indonesia menyelenggarakan dua pemilihan umum, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

“Kedua pemilu berjalan dengan damai dan lancar. Banyak orang menilai, Pemilu tahun ini adalah pemilu yang paling akuntabel dan transparan. Tahun ini, angka partisipasi publik keikutsertaan pemilu juga meningkat,” kata Setya dalam pidatonya. Dilanjutkan dengan memperkenalkan Pimpinan DPR terpilih untuk periode 2014-2019.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pihaknya percaya bahwa DPR periode ini akan mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Mengingat DPR memiliki peranan penting dalam hubungan diplomatik.

“Saya percaya, hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara sahabat maupun organisasi internasional akan semakin kuat ke depannya,” harap Setya.

Anggota DPR Tantowi Yahya juga tu-

rut memberikan pidato di depan para tamu. Ia menyatakan, pemilu yang telah berlangsung kemarin telah memberikan pelajaran politik bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana demokrasi sedang bergairah. Sehingga ke depannya, Indonesia dapat memenej demokrasi dan membuat komitmen yang kuat untuk menumbuhkan lebih besar dan lebih kuat dari waktu ke waktu.

“Pada DPR periode baru ini, kami memikirkan untuk membuat tradisi baru, dengan membuat pertemuan di antara parlemen dan pihak yang berkepentingan. Ini bisa kita sebut dengan diplomasi, dan kita harapkan ini merupakan momen yang tepat,” jelas Tantowi.

Pertemuan berlangsung dengan cukup meriah. Selama acara makan malam, para tamu disuguhi berbagai tarian tradisional, seperti Tari Nyai Lenggang, Tari Jaipong, dan Tari Piring. Usai acara, seluruh tamu yang hadir memberikan ucapan selamat kepada Pimpinan DPR periode 2014-2019.

(sf) foto: iwan armanias/parle/iw



Suasana Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 dengan agenda Penetapan Jumlah Komisi-komisi dan Komposisi Anggota Fraksi pada AKD, Kamis (16/10). Foto: Iwan Armanias/Parle/lw.



Suasana Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi terkait jadwal Rapat Paripurna tanggal 22 Oktober 2014, Kamis (16/10). Foto: Iwan Armanias/Parle/lw.